

# PERGURUAN TINGGI AGAMA KATOLIK SEBAGAI SALAH SATU PUSAT PEMBELAJARAN KEBANGSAAN, KEBHINEKAAN, DAN TOLERANSI

**Fransiskus Janu Hamu**

STIPAS Tahasak Danum Pabelum

Email: fijai\_pr@hotmail.com

***Abstract:***

*The title of this article is “Catholic College as one of the education religious center to promotion about nationality, diversity and tolerance.” The contribution of this article is as thought contributions in addressing the problem of nation and State related to peace, security, stability, and the sustainability of the unitary state of the Republic of Indonesia. This writing about life experiences about nationality and state according to the Catholic religious college perspective. Some of the aspects that are a staple of discussion are: First, it examines the problem of identity, second, alert and prevention against the threat of schism. Third, the working agenda of the Catholic religious College in the care of Indonesia our home. This article recommends that every religious institution of higher education as intellectual community makes the religious college as a place of learning to promotion the diversity, tolerance, love of the homeland and nationalism.*

***Keywords:***

The religious college, nationality, diversity, tolerance.

## Latar Belakang

Suatu ketika saya bercakap-cakap dengan salah seorang misionaris asing yang kebetulan adalah rekan sekomunitas. Ia sudah berada di Indonesia sejak 50 tahun yang lalu. Topik pembicaraan kami seputar situasi dan kondisi terkini Indonesia. Dalam pembicaraan di pagi itu, dia mengutarakan banyak hal tentang Indonesia mulai dari keberagaman, wilayah yang luas, alam yang kaya dan indah, manusia yang ramah dan murah senyum, sifat kekeluargaan dan gotong royong, serta makanan yang enak. Namun, pria 80 tahun itu mengaku ada beberapa hal yang tidak disukai dari keadaan Indonesia saat ini yakni “Korupsi dan KKN, konflik dan kekerasan yang akan melahirkan benih intoleransi.”<sup>1</sup>

Kontribusi artikel ini tidak berpretensi mengurai benang kusut yang melilit kehidupan bersama dalam masyarakat multietnis dan multikultural. Sebaliknya berbagai publikasi yang telah mengulas tentang konflik dan kekerasan yakni problem-problem mendasar yang dihadapi bangsa tentu menjadi ancaman serius bukan hanya bagi perdamaian, keamanan, stabilitas, tetapi juga bagi keberlangsungan NKRI, hal itu kami pandang sebagai bagian integral dari agenda kerja Perguruan Tinggi Agama Katolik yang terpanggil mengemban misi Persatuan, Persaudaraan, Perdamaian dan Kasih.

Tulisan ini akan mengulas pengalaman hidup berbangsa dan bernegara dari perspektif perguruan tinggi keagamaan Katolik. Ada pun sudut bidiknya adalah sebagai berikut: *Pertama*, akan menelaah problem identitas Indonesia, *Kedua*, Waspada dan pencegahan terhadap ancaman perpecahan. *Ketiga*, akan memaparkan tentang agenda kerja perguruan tinggi keagamaan Katolik dalam Merawat Indonesia Rumah Kita.

## Narasi Identitas Indonesia

Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan rahmat Allah atas kemajemukan Nusantara sebagai cikal bakal negara bangsa Indonesia. Kemajemukan demografis, sosiologis, kultural, bahasa

---

1 Fransiskus Janu Hamu, *Makalah Seminar Nasional STAHN*, Palangkaraya 20 Juli 2017.

dan keyakinan yang dimiliki Nusantara berujung pada keinginan untuk bersatu yang lahir dari kesamaan nasib dan cita-cita untuk menjadi sebuah entitas bangsa yang merdeka dari kungkungan penjajah.

Terbentuknya Indonesia dengan semboyan “*satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa*”, kiranya tidak terlepas dari kesadaran para pemimpin suku yang meyakini bahwa kesatuan ini akan sangat berguna untuk hidup bersama. Secara khusus pada saat “Sumpah Pemuda” itu diikrarkan, mereka memiliki cita-cita luhur kemerdekaan bangsa. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Belanda dirasakan lebih efektif kalau dilaksanakan bersama-sama. “*Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh*”, itulah kiranya pepatah yang dianut dan dijadikan pegangan untuk perjuangan itu. Masing-masing suku yang sudah memiliki bahasa, adat, hukum, dan lain-lain, yakin bahwa apa yang mereka miliki pun akan dapat dimanfaatkan untuk perjuangan itu, dan kemudian untuk menata kehidupan bersama.<sup>2</sup> Dengan kata lain, di satu pihak menjadi jelas bahwa memang ada ke-Indonesia-an yang berupa kesatuan bahasa, kesatuan tempat tinggal dan tanah air, dan kesatuan masyarakat dalam suatu Negara yang disebut bangsa Indonesia. Namun di lain pihak yang nampak bahwa kebangsaan itu terurai dalam wajah-wajah suku yang banyak jumlahnya. Malahan sama-sama berbahasa Indonesia, tetapi ada gaya bahasa Indonesia ala Madura, Jawa, Sumatera, Papua, Ambon, NTT, dan lain-lain. Ada sekian kata dari bahasa daerah dan bahasa suku setempat yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dipakai oleh masing-masing suku.<sup>3</sup>

Keindonesiaan mulai terbentuk sejak tahun 1928, selanjutnya dibakukan dan diakui secara internasional mulai tahun 1945. Keindonesiaan ini ternyata masih berproses, baik dalam bidang politik maupun budaya. Fenomena-fenomena yang tampak memperlihatkan bahwa adanya kelompok-kelompok yang masih ingin berpisah dari NKRI menunjukkan bahwa proses ini belum seratus persen dilalui.

---

2 Y.C.Tambun Anyang, “Budaya Dayak: Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Adat Dayak Dewasa Ini,” dalam *Jurnal Iman dan Budaya*, Vol. 1, No.3, Sep. 2002, hlm. 23.

3 A.M.Sutrisnaatmaka, *Budaya Kristiani, Budaya Indonesia Dan Budaya Suku-suku*, Komisi Teologi KWI, Jakarta, 2006, hlm. 102.

Diberlakukannya otonomi daerah dan diadakannya Pilkada juga menunjukkan proses pengindonesiaan masih terus berlangsung dan berkembang secara dinamis.

Membentuk dan menciptakan ke-Indonesia-an, yang sering diistilakan dengan Indonesianisasi, dapat dilihat dari berbagai seginya. Singkatnya “*Indonesianisasi*” dimaksudkan sebagai “proses, tindakan, cara mengindonesiakan sesuatu.”<sup>4</sup> Dari sinilah mulai digali apa sebenarnya yang menjadi ciri khas ke-Indonesia-an itu. Ada unsur kesatuan nusa, bangsa dan bahasa, ada pengikat Pancasila, dan keanekaragaman di dalam kesatuan itu.<sup>5</sup>

Realitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, sangat besar pengaruhnya dalam mengkondisikan heterogenitas etnik dan sosio kultural masyarakatnya. A. Kumbara, mengatakan bahwa:

... beberapa etnis yang berbeda secara historis sebelum kemerdekaan sebagian memiliki teritorial (pulau) yang terpisah dengan pulau-pulau yang dihuni oleh etnis lain dan memiliki pemerintahan yang otonom. Akibatnya jika muncul persoalan yang berkaitan dengan hubungan antar etnis, maka klaim-klaim teritorial dan identitas kultural lokal, bahkan perbedaan agama dapat dijadikan alasan/legitimasi untuk melakukan tindakan kekerasan politik terhadap kelompok minoritas atau kelompok pendatang. Jika kondisi yang demikian terus berlangsung niscaya akan dapat menggoyahkan dan membahayakan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan.<sup>6</sup>

Secara historis tradisional, harus diakui bahwa kelompok etnis berkaitan langsung kepada kebudayaan lokal tertentu. Sedangkan secara politis, etnisitas mendahului NKRI. Hal itu berarti identitas etnisitas

---

4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, cet.ke-3, hlm. 330.

5 Huub J.W.M.Boelaars, *Indonesianisasi, Dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 2005, hlm. 23.

6 Kumbara, A. A. Ngurah Anom, *Etnisitas dan Kebangkitan Kembali Politik Aliran pada Era Reformasi; Perspektif Teoritis*; dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra, ed., *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsa Press, 2004.

mendahului identitas kebangsaan dan kenegaraan. Sebagai etnisitas kultural, kelompok-kelompok etnis itu telah memiliki pemerintahan yang otonom sebelum NKRI dan mendapat pengakuan internasional. Dalam relasi antar etnis, setiap kelompok etnis menjadikan kebudayaan etnis masing-masing (*indigenous culture*) sebagai *a set of reference* yang menyatukan secara internal dan sekaligus menunjukkan distingsi dari kelompok-kelompok etnis lain secara eksternal.<sup>7</sup>

Bertolak dari terma etnis yang satu dibandingkan dengan terma etnis yang lain, seperti ilustrasi Anom Kumbara di atas, tentu akan muncul pola pikir dikotomis yang saling mengucilkan. Apalagi dipertajam dengan realitas negara kepulauan yang masyarakatnya memiliki '*island mentality*' atau '*bunker mentality*'. Maka dapat dipastikan gagasan baru yang akan muncul ke permukaan adalah, orang Jawa adalah pribumi di wilayah Pulau Jawa, Orang Dayak adalah pribumi di wilayah Pulau Kalimantan, Orang Papua adalah pribumi di wilayah Pulau Papua. Maka dampak sosial yang dapat ditimbulkan adalah orang non-etnis Jawa yang tinggal di Paulau Jawa akan dianggap sebagai orang luar, orang pendatang, tamu. Demikian juga dengan orang non etnis Papua yang ada di Pulau Papua dan orang non etnis Dayak yang ada di Pulau Kalimantan tetap dilihat sebagai orang luar bahkan orang lain. Jadi pola pikir dikotomis "*orang dalam-orang luar*" atau "*pribumi-non pribumi*" atau "*kami-mereka*", dapat dipandang sebagai nasib sial yang melekat pada setiap orang Indonesia.

Dalam bahasa agama, dikotomi itu berupa orang beriman dan orang kafir, orang saleh dan orang berdosa. Sedangkan dalam perspektif kekuasaan kultural dan politis ada pola pikir orang berkasta dan tidak berkasta, tuan dan hamba, dan seterusnya. Jadi logika antagonis yang diperkuat oleh latar belakang etnis, afiliasi agama dan status sosial menjadi alat untuk memperkuat kohesi dan solidaritas internal dan sekaligus menegasi kelompok lain (*outsiders*). Dampak dari pola pikir yang antagonis ini lambat laun akan melahirkan praktek diskriminatif dan ketimpangan sosial lainnya. Misalnya; penutupan tempat ibadah dan pelarangan

---

7 Raymundus, Sudhiarsa, *Paradigma Implementasi Ajaran Agama Katolik Di Tengah Isu Global "Sara"* Seri Filsafat Teologi Widya Sasana 13/12, 2008.

peribadatan oleh kelompok-kelompok ekstremis yang memandang diri sebagai warga negara kelas satu atau pemaksaan oleh kelompok mayoritas terhadap minoritas untuk berekspresi menurut kultur, aturan dan hukum mereka.<sup>8</sup>

Pengalaman mengalami ketimpangan sosial tentu tidak mengalahkan dan melenyapkan rasa “*Aku Indonesia*.” Optimisme sebagai warga negara dan warga bangsa yang menjunjung tinggi NKRI tidak akan lenyap oleh ancaman-ancaman sesaat. Catatan sejarah menunjukkan bahwa konflik bisa dikendalikan dan diatasi dengan terobosan-terobosan dialog politis, moral dan spiritual sebagai ungkapan rasa hormat sewajarnya dan toleransi.<sup>9</sup> Dalam negara multi etnis dan multi religius, tentu saja menghargai kemajemukan menjadi kondisi yang tidak bisa ditawar (*conditio sine qua non*). Prinsip-prinsip rasa hormat dan toleransi telah dirumuskan oleh para *the founding fathers* bangsa Indonesia dengan pilar yang disebut Pancasila (*Five Principles*) dan Bhineka Tunggal Ika. Apa yang telah dirumuskan dalam kelima sila Pancasila itu melampaui tembok-tembok pemisah yang tercipta oleh watak sosial primordial dan eksklusivisme sektarian banyak orang Indonesia.

Melihat peran fundamental Pancasila, diharapkan berfungsi efektif bagi masyarakat majemuk. Di sinilah, letak tugas dan tanggung jawab setiap perguruan tinggi keagamaan untuk menjadikan diri sebagai agen sekaligus menjadi pusat pembelajaran kebangsaan, kebinekaan dan toleransi. Jika perguruan tinggi keagamaan menjalankan roda edukasi berdasarkan dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, maka dapat dipastikan NKRI tetap eksis.

## Waspada dan Pencegahan

Kebhinekaan adalah anugerah sekaligus aset. Konsep itulah sesungguhnya yang menumpulkan lancipnya perbedaan dalam bungkus

---

8 John, Galtung, *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*, 2002: 434

9 Raymundus Sudhiarsa, *Dialog Antar Iman dan Budaya*, Jakarta: Komisi Teologi KWI, 2006., hlm. 123.

toleransi dan tenggang rasa. Di dalam kebinekaan, sejatinya terkandung ikhtiar untuk merajut setiap perbedaan demi memproduksi kekuatan yang berbasis persatuan. Namun sangat ironis, negeri ini justru kerap mengingkari anugerah itu. Indonesia yang bineka malah sering terbentur oleh masalah kebhinekaan. Indonesia yang didirikan karena keberhasilan para founding father menyatukan perbedaan kini justru menghadapi persoalan rapuhnya toleransi. Karena itu, tidak cukup hanya ungkapan prihatin atau mengutuk. Juga, sangat tidak produktif ketika kebhinekaan atau keberagaman itu hanya diperdebatkan sampai mulut berbui dan otot-otot leher mengengang. Apalagi kalau ditimpali dengan ujaran-ujaran kebencian, fitnah, dan caci maki.

Kini saatnya seluruh komponen bangsa mengerahkan segala daya dan upaya karena bibit-bibit intoleransi telah meracuni pola pikir sebagian masyarakat bahkan merambah hingga ke dunia pendidikan. Berhadapan dengan meningkatnya sentimen konflik agama dan ras di Indonesia, termasuk diskriminasi dan dominasi etnis mayoritas terhadap minoritas, Kemendikbud pada Juli-September 2016 telah melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan bahwa 8,2 persen pelajar yang menjadi responden menolak ketua OSIS dari agama berbeda. Selain itu, ada pula 23 persen responden yang merasa lebih nyaman dipimpin oleh seseorang yang satu agama.<sup>10</sup>

Kecuali itu, temuan dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, menyatakan bahwa 52,3 persen siswa yang menjadi responden setuju dengan kekerasan demi solidaritas agama. Penelitian itu juga menyebutkan 25 persen siswa dan 21 persen guru menyatakan Pancasila tak relevan lagi. Bahkan setuju penerapan syariat Islam di Indonesia ada 84,8 persen siswa dan 76,2 persen guru.<sup>11</sup>

Temuan-temuan tersebut menjadi peringatan dan perlu disikapi secara serius oleh semua pihak. Tentu sangat berbahaya jika sekolah dan

---

10 Estu Suryowati, "Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/14210661/pilkada.dki.dikhawatirkan.timbulkan.intoleransi.di.lingkungan.sekolah>

11 Arman Dhani, "Anak Muda dan Identitas Islam Indonesia" dalam <https://tirto.id/anak-muda-dan-identitas-islam-indonesia-bo32>

perguruan tinggi yang seharusnya menjadi tempat menyemai budaya toleransi, malah memunculkan peluang paham radikal dan intoleransi. Bila dicermati dengan seksama dapat disimpulkan bahwa benih intoleransi itu muncul dikarenakan beberapa faktor:

- a. Tingkat pemahaman akan nilai kebangsaan yang sempit di sekolah. Hal itu karena model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik menghafal rumus dan teori sehingga mengesampingkan proses atau latihan analisis dan penalaran yang lebih alamiah.
- b. Penanaman nilai agama yang eksklusif. Proses pengajaran cenderung doktriner dan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan sikap keberagaman siswa. Pendidikan yang eksklusif menjadikan siswa merasa agamanya paling baik. Kemudian memberi jarak dengan anak-anak lain yang tidak seiman.
- c. Perlakuan sekolah yang hanya menerapkan nilai-nilai agama tertentu, khususnya yang mayoritas. Padahal di sekolah itu ada siswa dari berbagai agama. Misalkan dalam berdoa sebelum pelajaran dan sesudahnya, perayaan agama, dan sebagainya hanya menonjolkan ritual agama tertentu. Hal itu bisa menyempitkan ruang-ruang tumbuhnya semangat toleransi beragama di kalangan siswa.

Hiruk pikuk politik dan perebutan kekuasaan, masalah ekonomi, sedikit banyak telah membuat negara “*melupakan*” tugasnya untuk menjelaskan kepada rakyat apa arti penting kebinekaan dan integrasi bangsa. Negara seolah menganggap rakyat sudah paham dengan semua itu. Ruang toleransi tak dipelihara dengan baik dan dibiarkan kosong. Bangunan-bangunan tenggang rasa yang ambruk di sana-sini belum dibangun kembali. Akibatnya fatal, dalam kekosongan itu rakyat menjadi mudah dijejali fanatisme kebablasan yang lebih menonjolkan identitas diri, golongan, maupun identitas religi. Kini, kealpaan negara itu mesti dibayar tuntas. Penegakan hukum ialah solusi jangka pendek yang harus dipilih untuk meredam paham dan perilaku intoleran yang kian menyeruak di ruang publik. Hukum akan tegak jika perangkat negara, siapa pun itu, tidak tunduk pada tekanan. Hukum tidak dapat dinegosiasikan oleh siapa pun dan oleh upaya apa pun. Pada saat yang sama, negara perlu memiliki



kemauan dan kesediaan untuk mengevaluasi peraturan-peraturan yang belum mengimplementasikan semangat keberagaman.

Anugerah keberagaman itu mestinya dijaga, dirawat, dan setelah itu dipraktikkan. Lantas bagaimana caranya? Dalam konteks ini peran perguruan tinggi keagamaan sangat strategis dan keterlibatannya dinantikan.

## **Menjaga Dan Merawat Indonesia Rumah Kita**

Apakah Indonesia adalah rumah kita? Mengapa keberadaan Indonesia mesti dirawat? Bagaimana cara merawat Indonesia rumah kita? Siapa yang paling bertanggungjawab dalam merawat Indonesia sebagai rumah kita?

Pertanyaan-pertanyaan fundamental di atas tentu menggugat setiap anak bangsa untuk memberikan jawaban. Lalu bagaimana dengan respon perguruan tinggi keagamaan? Perguruan Tinggi Keagamaan sebagai komunitas dan kelompok intelektual memiliki tanggungjawab moral dan peran strategis dalam menyikapi persoalan kebangsaan dengan mengambil langkah-langkah kongkrit dalam wujud:

- a. Menanamkan semangat kebangsaan, nasionalisme dan cinta tanah air baik di ruang-ruang kelas maupun di ruang publik
- b. Menjadikan perguruan tinggi keagamaan sebagai central pembelajaran kebangsaan, kebhinekaan, toleransi, nasionalisme dan cinta tanah air
- c. Menjadikan Perguruan tinggi sebagai tempat peneguhan bahwa Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ideologi dan bentuk negara merupakan pilihan yang sudah final maka seluruh elemen bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan merawat Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Menjadikan Perguruan Tinggi Keagamaan sebagai ruang perjumpaan antar kelompok masyarakat dalam merawat dan menjaga keutuhan NKRI.

Lalu bagaimana dengan Perguruan Tinggi Agama Katolik? Tanda kepeduliaanya dalam menjaga keutuhan NKRI diungkapkan dalam beberapa agenda kerja sebagai berikut:

- 1) Design kurikulum perguruan tinggi agama Katolik yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila
- 2) Menciptakan iklim kampus yang menghargai keberagaman, kebersamaan dan toleransi
- 3) Menciptakan suasana akademik yang ramah, aman, nyaman dan menyenangkan sehingga seluruh civitas akademika merasakan sebagai bagian dari anggota keluarga besar

## **Rekomendasi**

- 1) Perguruan Tinggi Keagamaan bukan saja sebagai forum dan proses mengembangkan potensi cipta, rasa dan karsa dalam diri mahasiswa, tetapi juga sebagai sarana ritual pembentukan karakter toleransi yang cukup efektif. Oleh karena itu, pendidikan inklusif dengan aneka ragam latar belakang sosial dalam satu lingkungan kampus menjadi sangat penting.
- 2) Pemerintah sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional harus bisa mengambil kebijakan agar kampus benar-benar sebagai arena menumbuhkembangkan dan membangun sikap toleransi
- 3) Perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat khususnya yang berbasis agama dan atau golongan, yang berkesan eksklusif, diwajibkan melaksanakan kurikulum dan kegiatan ekstra kurikuler yang mencerminkan adanya sikap toleransi. Maka perlu pengawasan yang ketat agar sikap eksklusifitas sekolah/kampus yang berpotensi munculnya benih intoleransi tidak berkembang.
- 4) Pemerintah diharapkan berani bertindak tegas dan melakukan pembinaan terhadap ormas-ormas yang dinilai intoleran.

## **Penutup**

Realita memperlihatkan bahwa sesungguhnya kita adalah berbeda. Mengapa kita berbeda? Karena Tuhan Sang Pencipta dengan sengaja menciptakan perbedaan di antara kita. Oleh sebab itu, sikap toleransi dan

belas kasih merupakan syarat mutlak dan kewajiban agar terwujudnya harmonisasi yang indah.

## Rujukan

- Anyang, Y.C.Tambun. 2002. "Budaya Dayak: Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat Dayak dewasa ini" dalam *Jurnal Iman dan Budaya*, Vol. 1, No.3, Sep. 2002.
- Boelaars, Huub J.W.M. 2005. *Indonesianisasi, Dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dhani, Arman. "Anak Muda dan Identitas Islam Indonesia" dalam <https://tirto.id/>
- Galtung, John. 2002. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*.
- Hamu, Fransiskus Janu 2017. *Makalah Seminar Nasional STAH*, Palangkaraya Kompas, 2/5/2017.
- Kumbara, A.A. Ngurah Anom. 2004. Etnisitas dan Kebangkitan Kembali Politik Aliran pada Era Reformasi; Perspektif Teoritis; dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra, ed., *Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik*, Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsa Press
- Sudhiarsa, Raymundus. 2008. "Paradigma Implementasi Ajaran Agama Katolik Di Tengah Isu Global 'SARA,'" dalam *Seri Filsafat Teologi Widya Sasana*, 13/12, 2008.
- Sudhiarsa, Raymundus. 2006. *Dialog Antar Iman dan Budaya*, Jakarta: Komisi Teologi KWI
- Suryowati, Estu. "Pilkada DKI Dikhawatirkan Timbulkan Intoleransi di Lingkungan Sekolah" dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/14210661>
- Sutrisnaatmaka, Aloysius, M. 2006. *Budaya Kristiani, Budaya Indonesia Dan Budaya Suku-suku*. Jakarta: Komisi Teologi KWI.